KR-Surya Adi Lesmana

***PLAKAT HASIL BARTER:** Pengunjung melintasi instalasi seni 'Tribute to Fighter' karya Soni Irawan bagian dari Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di kompleks Teras Malioboro 1, Yogyakarta, Selasa (13/9). Semua plakat yang tertempel tersebut merupakan hasil barter dengan para penjual di jalanan.*

RETAS DATA PEMERINTAH

BSSN Telusuri Bjorka

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, pihaknya tengah menelusuri latar belakang peretas 'Bjorka' yang melakukan peretasan data ke sejumlah situs Pemerintah. "Sedang kita telusuri," kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9).

Guna menelusuri latar belakang peretas Bjorka itu, Hinsa menyebut masih terus berproses lantaran serangan itu dilancarkan di ruang siber. "Bukan kayak mencari secara fisik," ucapnya.

Untuk itu, ia mengatakan BSSN berkoordinasi pula dengan pihak Bareskrim Polri terkait dengan forensik digital untuk menelusuri latar belakang peretas Bjorka. "Kita bersama-sama dengan aparat terkait, khususnya Bareskrim kita juga berkoordinasi," ujarnya.

Selain itu, Hinsa menyebut BSSN berkoordinasi dengan stakeholder pemilik data yang diduga diretas, agar melakukan evaluasi sistem. Menurutnya, masing-masing kementerian/lembaga ikut bertanggung jawab terhadap masalah keamanan sistem elektronik. "Karena sebagian juga enggak merasa 'kami merasa tidak kehilangan data' atau tidak tahu," katanya.

Ia mengatakan, BSSN memberikan layanan IT Security Assessment (ITSA) untuk menemukan celah kerentanan pada layanan publik berbasis sistem informasi oleh penyelenggara negara. Terkait isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mencuat beberapa waktu belakangan, Hinsa mengimbau masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi serangan peretas di ruang siber.

Ia menyebut secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik, dan serangan siber yang dilancarkan peretas Bjorka masih masuk dalam klasifikasi intensitas rendah. "Menyikapi dengan tenang tapi bukan berarti abai, jadi intensitasnya kalau dalam siber intensitas rendah dan kita harapkan jangan sampai terjadi juga meningkat," ujarnya. **(Ant)-f**

PENGANGGURAN TERBUKA DI DIY MASIH TINGGI

Angka Kemiskinan di Atas Rata-rata Nasional

YOGYA (KR) - Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,20 persen. Angka ini sudah termasuk baik jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Struktur ekonomi DIY ada beberapa hal yang perlu perhatian dan nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Pertama, dari sisi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di jasa lainnya. Berkaitan dengan transportasi dan perdagangan serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

"Ini adalah lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di DIY. Dari industri, informasi komunikasi serta akomodasi dan makanan minuman juga lapangan usaha yang mendominasi dari perekonomian DIY," ujar Sekda DIY Baskara Aji dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Pokok-pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD 2024, Selasa (13/8).

Sekda menambahkan, hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemda DIY adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada Februari 2022 sebesar 3,73 persen. Angka ini turun pada periode yang sama pada 2021. Sedangkan tingkat pengangguran di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan pedesaan.

Selain itu, masih ada 1,23 juta orang atau setara 57,31 persen dari angkatan kerja, bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan tidak jelas. Sedangkan 9,39 persen penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Saat ini angka kemiskinan di DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34 persen atau turun 0,57 poin dibandingkan periode September 2021.

"Perlu kita lihat apakah kinerja kita untuk mengurangi angka kemiskinan memang banyak hambatan atau dampak dari Covid-19 atau dua-duanya. Tentu, hal itu menjadi alasan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Namun, angka 0,57 itu sebetulnya tidak kita harapkan. Karena semestinya kita bisa lebih dari angka itu," jelasnya.

Untuk jumlah penduduk miskin di DIY ada 454.760 orang pada Maret 2022. Dibandingkan September 2021, turun 19,7 ribu orang. Namun, angka kemiskinan DIY masih tinggi secara nasional. Untuk visi RPJPD 2025-2025 masih sama, yakni mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Penekanan RPJPD DIY 2005-2025 tahapan tahun IV (2020-2025) adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung. Penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung ketersediaan energi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda DIY juga menyebutkan ada 10 isu strategis di DIY yang akan menjadi bahan dalam penyusunan pokok pikiran RKPD 2024. Pengembangan wilayah selatan DIY, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penanganan dan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Kemudian, tentang respons peluang transnasional, percepatan pembangunan perdesaan, percepatan penanggulangan kemiskinan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, perkembangan TI, penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris asimetris serta kebudayaan. **(Awh/Bro)-f**

OJK Dorong Penguatan Industri Keuangan Nonbank

JAKARTA (KR) - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, untuk mendorong penguatan sektor IKNB, OJK menerapkan penguatan pada tiga layer.

Pertama, penguatan organisasi di internal Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) melalui penguatan sisi good corporate governance dan penerapan manajemen risiko yang efektif dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Selain itu, OJK juga mendorong LJKNB untuk melakukan penguatan core functions sehingga didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, antara lain di bidang aktuaria, akuntansi, dan audit internal," kata Ogi Prastomiyono pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/9).

Kedua, lanjutnya, penguatan dari sisi lembaga profesi penunjang dan asosiasi industri di sektor IKNB. Berbagai lembaga profesi penunjang seperti akuntan publik, aktuaris, maupun penilai merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan sektor IKNB, khususnya dalam hal penegakan kode etik profesi dan pengembangan kompetensi SDM di sektor IKNB. Demikian pula halnya dengan peran asosiasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para anggotanya, khususnya yang terkait dengan aspek perlindungan konsumen. **(Lmg)-d**

Tersangka Korupsi Dana Pos Dilimpahkan ke Kejaksaan Purbalingga

PURBALINGGA (KR) - Penyidikan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Purbalingga terhadap ES (30), tersangka pelaku penggelapan uang ratusan juta rupiah telah selesai dan dinyatakan P21. Mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Rembang Purbalingga itu, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga berikut barang buktinya, Selasa (13/9).

"Sekarang dalam status tahanan kejaksaan dan ditempatkan di Rutan Kelas II B Purbalingga selama 20 hari," tutur Kasi Intel Kajari Purbalingga, Bambang Wahyu Wardhana.

Tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap ES saat bekerja di Kantor Pos Cabang Rembang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 396.485.077. Modus penggelapan uang yang dikelolanya beragam. Pada 22 April 2022, ES selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Kecamatan Rembang mengelola kas operasional sebesar Rp 443.424.364. Dana itu bersumber dari kas Kantor Pos Cabang Purbalingga.

Dana itu dialokasikan untuk pembayaran pensiun ke-13 Taspen Rp 150 juta, pembayaran pensiun ke-13 BPTP Rp 50 juta, penyaluran BNPT Kemensos RI Rp 100 juta dan penyaluran dana wesel nasional dan internasional serta jasa pelayanan keuangan lainnya.

Pada hari yang sama, selain melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, ES juga menerima uang dari kegiatan pembayaran online. Meliputi pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, pembayaran pajak dan lainnya sebesar Rp 52.513.004. Pada akhir jam kerja pukul 15.00, ada dana kas sebesar Rp 394.409.977. Uang itu seharusnya disimpan dalam brankas untuk kegiatan penyaluran pensiun ke-13 dan BPNT pada esok harinya. Namun, ES menggunakan uang itu ditambah hasil penjualan benda pos dan meterai sebesar Rp 2.075.100 untuk keperluan pribadi.

Tersangka menyetorkan Rp 200 juta ke rekening BCA atas namanya. Kemudian digunakan deposit trading crypto binance Rp 150 juta. Dari rekening itu ES juga membayar utang kepada pihak lain Rp 20 juta dan untuk keperluan lain Rp 10 juta.

ES juga menggunakan dana Rp 52 Juta untuk membayar pinjaman pribadinya di sebuah lembaga jasa keuangan di Kecamatan Pengadegan. Sisanya digunakan untuk keperluan pribadi. Termasuk biaya perjalanan dan penginapan di hotel selama pelariannya ke Denpasar. **(Rus)-f**

DOKUMENTASIKAN G20 BIDANG KEBUDAYAAN

Kemendikbudristek Terbitkan Prangko

BOROBUDUR (KR) - Kemendikbudristek bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo menerbitkan prangko dan sampul peringatan G20 Culture Ministers' Meeting yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Peristiwa ini merupakan bagian dari Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Kebudayaan yang diselenggarakan di Kawasan Candi Borobudur, Selasa (13/9).

Menteri Nadiem menjelaskan, prangko tersebut merupakan bentuk lain untuk mendokumentasikan momen bersejarah Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Kebudayaan. "Prangko dan sampul peringatan ini merupakan salah satu produk resmi negara untuk mempromosikan budaya maupun kekayaan alam Indonesia ke publik internasional,"kata Nadiem.

Alit Ambara, seniman asal DIY, merupakan sosok yang merancang desain prangko dan sampul peringatan G20 Culture Ministers' Meeting. Desain tersebut mengandung makna pentingnya pelestarian dan pengembangan lingkungan secara berkelanjutan melalui jalan kebudayaan sebagai tanggung jawab. Bertajuk 'Borobudur Glitch', Borobudur diilustrasikan sebagai sumber ketenangan dunia. "Perkembangan pengetahuan dan kemajuan teknologi saat ini seharusnya tidak serta merta menghilangkan nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong, tetapi dapat dikombinasikan menjadi dasar yang kokoh untuk menopang kehidupan yang lebih baik," tambah Nadiem.

Merujuk tema *Culture for Sustainable Living* atau 'Kebudayaan untuk Kehidupan Berkelanjutan', prangko tersebut menjadi pengingat banyaknya perubahan yang menggerus kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, terbitnya prangko tersebut diharapkan mampu menguatkan komitmen pelestarian Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia.

Untuk terus menguatkan posisi budaya sebagai pondasi kehidupan dan mempromosikan Candi Borobudur ke seluruh dunia, prangko dan Sampul Peringatan Culture Ministers' Meeting G20 'Borobudur Glitch' diberikan sebagai cendera mata untuk para delegasi G20 yang telah hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Kebudayaan. **(Ati)-f**

PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN GARI

Biro TAPEM Arahkan Peningkatan Kinerja Lembaga Pemerintah Kalurahan

Kanjeng Yudanegara saat memberikan sambutan dan arahan pada Pelantikan Pamong Kalurahan Gari

WONOSARI (KR) - Biro Tapem Setda DIY melalui KPH. H. Yudanegara, Ph.D. menghadiri undangan Lurah Gari dalam Pelantikan Pamong Kalurahan di Balai Kalurahan Gari, Wonosari, Gunungkidul (12/9). Turut hadir pula, unsur DP3AKBPMK Kabupaten Gunungkidul, Forkorpimkap Wonosari, Kepala KUA Kapanewon Wonosari, serta Lurah se-Kapanewon Wonosari.

Lurah Gari, Widodo, S.IP., melantik tiga Pamong baru, yakni Dody Risky Pradama (Pangripta), Ratian Danu Eko Aldiyanto (Tata Laksana), dan Kelik Nugraha (Dukuh Gatak). Widodo berharap ketiga Pamong tersebut dapat meningkatkan kinerja Pemerintahan Kalurahan Gari menjadi lebih baik. "Saya harapkan ada terobosan atau inovasi dalam pelayanan", ucap Widodo.

Kanjeng Yudanegara dalam sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya Pamong baru Kalurahan Gari, sekaligus memberikan arahan agar ketiganya dapat menjalankan peran secara optimal, baik sebagai unsur penyelenggara pemerintahan maupun sebagai abdi masyarakat.

"Pamong Kalurahan secara sosio-kultural diperlukan perannya sebagai penasehat bagi pemimpin (dalam hal ini Lurah) maupun masyarakat. Di sinilah dituntut kesabaran, kebijaksanaan, dan seni komunikasi untuk "ngomong" dan "ngemong" masyarakatnya", kata Kanjeng Yudanegara.

Kanjeng Yudanegara kembali mengingatkan Visi dan Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan 2022-2027 mengenai Reformasi Kalurahan, yang mendudukkan Pemerintah Kalurahan sebagai subyek aktif bersama Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten untuk menurunkan angka kemiskinan, stunting, serta memaksimalkan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

"Saat Reformasi Kalurahan digulirkan nanti, maka Pangripta harus mampu mengukur ketercapaian RPJMKal sebagai fungsi pengendalian, Tata Laksana harus aktif memanfaatkan TIK dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta Dukuh harus aktif mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan publik, baik di wilayah padukuhan maupun di kantor Kalurahan".

Guna mempercepat adaptasi Pamong baru, Kanjeng Yudanegara berharap Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya dapat memberikan bimbingan. "Jangan ada lagi senioritas dan junioritas. Lurah bersama seluruh Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan merupakan satu tim efektif. Dengan demikian peningkatan kinerja lembaga Pemerintah Kalurahan dalam melayani masyarakat dapat terwujud", tutup Kanjeng Yudanegara. **(*)**